

**IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK  
BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN R.I. NOMOR 1 TAHUN 1991  
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**OLEH:**

**GUSTI HIJRAH SYAHPUTRA, S.H.I  
NPM.A21212033**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi pada Kejaksaan Negeri Mempawah). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan upaya meningkatkan peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah dalam kenyataannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena frekuensi penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah hanya 4 (empat) kali dalam setahun yang dibagi dalam per triwulan. Tolok ukur berhasil atau tidaknya kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah dapat dilihat dari jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mempawah. Adapun kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut: (a) Kurangnya personil untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (b) Luasnya wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah; (c) Minimnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan (d) Terbatasnya waktu untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya untuk meningkatkan peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat ditempuh dengan cara: (a) Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah. Misalnya: penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan sebulan sekali; (b) Melakukan penambahan personil di Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan (c) Mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

## **ABSTRACT**

This thesis discusses the role of the Public Prosecution Service in the field of public order and public order to organize public awareness raising activities based on Article 30 Paragraph (3) Sub-Paragraph a of Law Number 16 Year 2004 concerning the Attorney of the Republic of Indonesia (Study at State Prosecutor Mempawah). In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the obstacles that hamper the role of the State Prosecutor Mempawah in the field of public order and general peace to organize public awareness raising activities and efforts to increase the role of Public Prosecutor Mempawah in the field of public order and general peace to organize upgrading activities Public legal awareness. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that the role of Public Prosecutor Office in the field of public order and general peace to organize public awareness raising activities based on Article 30 Paragraph (3) Sub-Paragraph a of Law Number 16 Year 2004 regarding the Attorney General of the Republic of Indonesia to Attorney Negeri Mempawah in reality still not maximal. This is because the frequency of counseling and legal enforcement conducted by the Intelligence Section of the State Prosecutor Mempawah only 4 (four) times a year divided in quarterly. The benchmark of success or failure of legal awareness activities carried out by the Intelligence Section of State Prosecutor Mempawah can be seen from the number of criminal acts that occurred and the number of cases handled by the State Prosecutor Mempawah. The obstacles that impede the role of the Public Prosecution Service in the area of public order and general peace to organize public awareness raising activities are as follows: (a) Lack of personnel to organize public awareness raising activities; (b) The extent of the work area of the Mempaks Negeri Kejaksaan; (c) Lack of budget to organize public awareness raising activities; And (d) Limited time to organize public awareness raising activities. Efforts to increase the role of the Public Prosecution Service in public order and general peace to organize public awareness raising activities can be pursued by: (a) Increasing the frequency of organizing awareness raising activities in the working area of the Defense Prosecutor's Office. For example: the implementation of public awareness raising activities carried out once a month; (b) Increase personnel in the Intelligence Section of the Public Prosecutor's Office to conduct public awareness raising activities; And (c) Applying for additional budget to organize public awareness raising activities.

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan perkawinan disamping untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, menghubungkan silaturrahim juga untuk menciptakan keseimbangan dan melanjutkan keturunan, secara lahiriah pasangan suami istri pada umumnya sangat mendambakan keturunan yaitu anak yang merupakan hasil perkawinan sebagai penerus keluarga, anak merupakan curahan kasih sayang orang tua yang nantinya akan menjadi pewaris.

Secara realita banyak pasangan suami istri yang sudah berkecukupan dan perekonomian yang berlebihan belum berhasil memperoleh keturunan, sementara disatu sisi pasangan suami istri yang belum siap secara perekonomian belum tercukupi justru banyak mempunyai keturunan. Dari gambaran tersebut diatas suami istri yang tak memperoleh keturunan dapat mengangkat anak dari kedua orang tua yang menyerahkan anaknya untuk diadopsi menjadi anak angkat sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian terjadilah peralihan tanggungjawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada yang menerima, kemudian bersedia mendidik dan membesarkannya sebagaimana anak kandungnya sendiri.

Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, dimana jika terjadi sesuatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan . kedudukan anak angkat/orang tua angkat pada hukum waris yang di atur dalam Hukum adat keduanya adalah ahli waris yang saling mewarisi.

Terhitung sejak tahun 1991, berdasarkan Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, bangsa Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum Islam yang secara *de facto* maupun *de jure* menjadi pegangan utama umumnya para hakim dalam lingkungan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa hukum kewarisan yang diajukan oleh para pencari keadilan. Hukum kewarisan diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam yang lazim disingkat dengan sebutan KHI.

Keberadaan Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bagian hukum nasional, yang menjadi hukum positif di Indonesia (siyasah syar'iyah), bagi sebagian Hakim Pengadilan Agama Pontianak Islam di Indonesia masih diragukan dan mempertanyakannya, tidak terkecuali di kalangan akademisi sendiri yang membidangi hukum tersebut. Ini tentu menjadi pemicu timbulnya keragu-raguan kalangan masyarakat Islam yang masih tergolong awam untuk melaksanakan dan menerapkan Kompilasi Hukum Islam, terutama menyangkut soal kewarisan.<sup>1</sup>

Kemudian Ahmad Azhari juga mengungkapkan bahwa setidaknya ada dua hal yang menjadi latar belakang dibentuknya Kompilasi Hukum Islam oleh Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI, yaitu (1) agar Peradilan Agama memiliki peraturan yang jelas, yang diberlakukan sebagai hukum materiil yang jelas ini diharapkan penyelenggaraan hukum dapat berjalan baik dan lancar, kepastian hukum dan keadilan senantiasa dapat dijamin dan ditegakkan, karena itu Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal yang menyerupai peraturan perundang-undangan. Selama ini, hukum materiil yang dijadikan pedoman oleh hakim Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah 13 buah kitab fiqh madzhab Syafi'i yang ditunjuk oleh Biro Peradilan Agama, yang kini Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, dalam Surat Edarannya Nomor 8/I/735 Tahun 1958, yang di dalamnya mengandung banyak polemik, yang dapat menjadi sumber lahirnya putusan yang saling berdisparitas, dan berdampak pada ketidakpastian hukum, dan (2) dapat menampung nilai-nilai hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam Indonesia, sesuai pengertian KHI yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia, serta jiwa dan semangat pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>2</sup>

Untuk mempertegas latar belakang penyusunan KHI tersebut, A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, selanjutnya mengutip beberapa keterangan yang disampaikan oleh para penulis Hukum Islam, di antaranya

---

1 Ahmad Azhari, 2016, *Telaah Terhadap Hukum Kewarisan KHI*, Pontianak, Pecetakan Artha Grafistama, hal. 407

2 *Ibid*, hal. 410- 411

Satria Effendi M. Zen, Rahmat Djatmika, KH. Hasan Basri (Ketua Umum MUI) dan M. Yahya Harahap.

Satria Effendi dan M. Zen mengatakan bahwa. “ Suatu hal yang tidak dapat dibantah ialah bahwa hukum Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya, sampai hari ini adalah hukum fikih hasil penafsiran pada abad kedua dan beberapa abad berikutnya. Hal ini membuat hukum Islam tampak begitu kaku berhadapan dengan masalah-masalah zaman modern yang amat banyak melibatkan masalah perekonomian. Materi-materi yang termaktub di dalam buku fikih tidak atau belum dapat disistemalisasikan, sehingga ia dapat disesuaikan dengan masa sekarang. Masalah yang dihadapi bukan hanya berupa perubahan struktur sosial, tapi juga perubahan kebutuhan dalam berbagai bentuknya. Banyak masalah baru pada zaman Rasulullah dan pada masa mujtahid di masa madzhab-madzhab terbentuk, tetapi berbagai sikap dalam menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. Satu pihak hendak berpegang pada tradisi dan penafsiran-penafsiran oleh ulama mujtahid terdahulu, sedangkan pihak lain menawarkan bahwa berpegang erat saja kepada penafsiran-penafsiran lama tidak cukup menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini. Penafsiran-penafsiran hendaklah diperbaharui sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini. Untuk itu, ijtihad perlu digalakkan kembali.<sup>3</sup>

KH. Hasan Basri menyebut KHI sebagai sebuah keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan orde baru. Dengan ini, nantinya umat Islam di Indonesia mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam, sehingga dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan agama, dan juga masalah khilafiyah yang disebabkan oleh masalah fikih akan dapat diakhiri. Dari statemen ini, A. Rahmad Rosyadi dan. H.M Rais Ahmad kemudian

---

3 A. Rahmad Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 99-100

menegaskan bahwa latar belakang pertama karena adanya disparitas putusan dan tajamnya polemik tentang hukum Islam.

Didasarkan pada Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 ini terdiri atas 3 Buku yakni Buku I memuat tentang Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan.

Dari paparan di atas diketahui, setidaknya ada dua hal yang menjadi latar belakang disusunnya KHI, yaitu pertama, secara substansial guna menampung dinamika dan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam yang heterogen, menumbuh dan menembangkan hukum, sesuai amanat yang tertulis dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan kedua, secara formal legalistik untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Kedua hal itu memang merupakan bagian yang teramat penting, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teorinya tentang tujuan hukum, yang membaginya ke dalam dua kerangka, yaitu (1) kerangka ideal berupa keadilan dan kemanfaatan yang menjadi substansi hukum, dan (2) kepastian yang merupakan kerangka operasional hukum itu, yang dijamin bukan aturan atau bentuk formalnya, tapi substansi hukumnya berupa keadilan dan kemanfaatan.<sup>4</sup>

Mengenai tujuan, M. Yahya Harahap,<sup>5</sup> mengemukakan empat macam sasaran pokok (tujuan) yang ingin dicapai dari pembentukan KHI, yaitu pertama, melengkapi pilar peradilan agama, kedua, menyamakan versi penerapan hukum, ketiga, mempercepat proses *taqribi bainal ummah*, dan keempat, menyingkirkan paham *private affair*.

Pertama, Peradilan Agama yang keberadaannya, kedudukan dan kewenangannya, telah mendapatkan legalitas formal dari Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang merupakan pelaksanaan atas amanat yang tertulis dalam Pasal 24 UUD 1945, telah memiliki pilar pertama, yaitu badan

---

4 Ahmad Azhari, 2016, *Telaah Terhadap Hukum Kewarisan KHI*, Op.Cit, hal. 418

5 M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23-27

peradilan yang terorganisasi berdasarkan kekuatan hukum Undang-undang, pilar kedua yaitu Organ Pelaksana, namun belum memiliki pilar ketiga berupa sarana hukum sebagai rujukan. Padahal ketiga pilar tersebut menurut Bustanul Arifin merupakan sukoguru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan oleh hukum dan konstitusi Negara RI.

Dari kenyataan dan pengalaman yang dikemukakan, keberadaan dan kehidupan Peradilan Agama, belum layak dikatakan Badan Peradilan atau Badan Kekuasaan Kehakiman. Pilar ketiga yang menjadi penopang keharusan kehidupan dan keberadaannya, belum sempurna. Hal itu tidak boleh dibiarkan berlarut. Kita harus membuang sikap ketidakpedulian kenyataan itu. Memang sejak zaman Hindia Belanda, sejarah telah membiarkan ketidaberesan itu. Peradilan Agama jarang dijamah dan diperhatikan. Seolah-olah hidup segan mati tak mau.

Satu-satunya jalan yang harus segera dipenuhi ialah melengkapinya dengan prasarana hukum positif yang bersifat unikatif. Untuk itu perlu jalan pintas yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan legalities yang formal, meskipun tidak maksimal dalam bentuk Undang-undang. Dipilihlah jalan pintas yang sederhana berupa Kompilasi.

Kedua, lahirnya KHI, telah jelas dan pasti nilai-nilai dan tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh nusantara.

Ketiga, KHI diharapkan dapat menjadi jembatan penyeberang ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan (khilafiyah). Paling tidak, hukum perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan dapat dipadu, disatukan dan dicari pemahaman yang sama.

Keempat, dalam penghayatan kesadaran masyarakat Islam selama ini menurut M. Yahya Harahap, nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan pribadi baginya. Perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan,

dipandang sebagai tindakan yang berdimensi hubungan vertical seseorang dengan Allah, tidak perlu campur tangan orang lain, termasuk oleh penguasa.

Dalam konteks sosiologis kompilasi yang bersubstansi hukum Islam itu jelas merupakan produk keputusan politik. Instrument hukum politik yang digunakan adalah Inpres no.1 tahun 1991. Selain formulasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia, KHI bisa disebut sebagai representasi dari sebagian substansi hukum material Islam yang dilegislasikan oleh penguasa politik pada zaman orde baru

Dengan demikian KHI mempunyai kedudukan yang penting dalam tata hukum Indonesia. Karena merupakan sebuah produk hukum dari proses politik orde baru. Karena itu selain bersifat nisbi, KHI dengan segala bentuknya, kecuali ruh hukum Islamnya, merupakan cerminan kehendak sosial para pembuatnya. Kehadirannya dengan demikian sejalan dengan motif-motif sosial, budaya dan politik tertentu dari pemberi legitimasi, dalam hal ini rezim politik orde baru.

Perkembangan konfigurasi politik senantiasa mempengaruhi perkembangan produk hukum. Konfigurasi politik tertentu senantiasa melahirkan produk hukum yang memiliki karakter tertentu. Konfigurasi politik yang demokratis senantiasa melahirkan hukum-hukum yang berkarakter upayasive/populistik, sedangkan konfigurasi politik otoriter senantiasa akan melahirkan hukum-hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks.

Pengaruh politik hukum terhadap KHI akan menjadi karakter-karakter politik hukum Islam di Indonesia. Pengaruh tersebut akan membawa konsekuensi untuk memperbincangkan kembali diskursus hukum agama dan hukum Negara di dalam wadah Negara Pancasila. Keberadaan hukum Islam harus diselaraskan dengan visi pembangunan hukum yang dicanangkan Negara. Disini lalu terjadi proses filterisasi terhadap materi hukum Islam oleh Negara.

Dengan demikian, secara ideologis KHI berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma Negara. Dalam paradigma agama, hukum Islam wajib dilaksanakan oleh Umat Islam secara kaffah, tidak mengenal ruang



dan waktu. Penerapannya dalam kehidupan sosial menjadi misi agama yang suci. Dengan kata lain bahwa hukum Islam berada dalam penguasaan hukum Negara dengan mempertimbangkan pluralitas agama, etnis, ras dan golongan. Hasil interaksi dari dua paradigma yang berbeda itu merupakan wujud nyata politik Negara terhadap hukum islam di Indonesia. Karena itu KHI merupakan satu-satunya hukum materiil Islam yang memperoleh legitimasi politik dan yuridis dari Negara.

Ada dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga KHI penting untuk disebarluaskan, pertama karena KHI diterima oleh Majelis Ulama Indonesia. Kedua Karena KHI bisa dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat yang memerlukannya.

Selanjutnya Abdurrahman,<sup>6</sup> mengungkapkan bahwa landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut Ismail Suny, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi Pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan maka Kompilasi Hukum Islam itu memuat hukum materiil nya dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Pendapat tersebut didasarkannya kepada disertasi A. Hamid S. Attamimi. Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yaitu Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama. Karena itu pembicaraan mengenai kedudukan Kompilasi tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi Presiden dimaksud.

Buku II Kompilasi Hukum Islam yang memuat tentang hukum kewarisan ini terdiri atas VI Bab dan 44 Pasal, yakni mulai Pasal 171 sampai Pasal 214. Buku II KHI pada dasarnya mengatur ihwal ketentuan umum (Bab I Pasal 171), ahli waris (Bab II Pasal 172 – 175), besarnya bagian masing-

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm.53

masing ahli waris (Bab III Pasal 176 -191), ‘aul dan rad (Bab IV Pasal 192 – 193, wasiat (Bab V Pasal 194 -209), dan hibah (Bab VI Pasal 210 -214).

Peneliti telah membaca secara berulang dan melakukan pengkajian tentang hukum kewarisan Islam yang diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam dengan dibantu buku-buku pendukung yang ditulis para ahli menemukan hal-hal sebagai berikut:

Secara umum dan keseluruhan, hukum kewarisan yang diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam, tampak sesuai benar atau bahkan memang diturunkan dari hukum faraid yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits terutama yang diatur dalam Pasal 176 – 182 dan Pasal 186. Namun demikian, tidak semua isi Kompilasi Hukum Islam memuat hukum Islam apa adanya dan karenanya kurangnya tepat kalau Kompilasi Hukum Islam itu dinyatakan isinya 100% hukum Islam. Paling tidak yang terkait dengan ihwal hak kewarisan anak angkat atau yang lebih dikenal dengan wasiat wajibah, berdasarkan hasil survey awal yang peneliti lakukan sepanjang bulan Januari hingga Februari 2017 paling sedikit masih tetap mendapatkan penolakan dari sebagian tokoh agama dan akademisi Kota Pontianak bahkan bagian terbesar pimpinan pondok pesantren dapat dikatakan belum atau tidak menerima kewarisan anak angkat atau wasiat wajibah.

Menurut Mardani,<sup>7</sup> pengertian wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa, atau member putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, dan diberikan kepada orang tertentu. Dinamakan wasiat wajibah, disebabkan dua hal, yaitu :

- a. Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsure kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat atau persetujuan penerima wasiat.
- b. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki 2(dua) kali lipat bagian perempuan.

---

7 Mardani, 2015, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.120

Sukris Sarmadi,<sup>8</sup> mengungkapkan bahwa pasal 171 ayat (h) *Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*. Dalam hukum Islam selama ini, anak angkat dianggap tidak berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya maupun sebaliknya yakni dari orang tua angkatnya maupun sebaliknya yakni dari orang tua angkat kepada anak angkatnya. Berbeda dengan hukum keperdataan barat yang mmeberi bagian tertentu kepada anak angkat. Se jauh ini, sebagaimana yang dikonfirmasi pasal 171 ayat (h). Walaupun demikian, hukum waris Islam sebagaimana yang terlihat dalam pasal 209 KHI telah memberikan jalan hubungannya dengan masalah kewarisan agar anak angkat memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya maupun sebaliknya melewati wasiat wajibah.

Sebagian besar masyarakat muslim Indonesia khususnya di Kota Pontianak menganut Madzhab Syafi'ie. Menurut Ahmad Zahari,<sup>9</sup> Dalam hal yang berhubungan dengan wasiat dan hibah. Tentang wasiat, teori Syafi'i dan KHI sama-sama berpendapat bahwa wasiat pada dasarnya diperuntukkan kepada mereka yang tidak mempunyai waris, atau kepada ahli waris yang mempunyai hak waris namun tidak mendapatkan haknya karena terhibah atau karena harta yang sudah terbagi habis oleh Ahli waris yang berhak atasnya, dengan batasan tidak boleh melebihi 1/3 harta. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris, demikian pula wasiat yang melebihi batas maksimal hanya berlaku jika ahli waris menyetujui (Pasal 194 ayat (1) jo. 195 ayat (2) dan (3) KHI).

Selanjutnya Ahmad Zahari,<sup>10</sup> juga mengungkapkan terdapat perbedaan mendasar yang antara teori Syafi'i dan KHI dalam masalah wasiat terletak pada lembaga wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI yaitu :

---

8 Sukris Sarmadi, 2013, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm.24

9 Ahmad Azhari, 2009, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Pontianak, FH Untan Press, hal. 201

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Melalui lembaga ini KHI memberikan bagian kepada anak dan orang tua angkat maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan pewaris. Ketentuan ini tidak dikenal oleh teori Syafi'i.

Wasiat wajibah sebenarnya merupakan terobosan atau cara lain untuk memberikan bagian kepada mereka yang tidak mempunyai hak waris. Dalam Undang-undang wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946 Pasal 76-79, Wasiat wajibah diberikan kepada cucu yang tidak mendapatkan bagian warisan, baik karena kedudukannya sebagai Dzawil arham maupun karena terhibah oleh ahli waris lain. Dikatakan cara lain karena pewaris semasa hidupnya sama sekali tidak pernah berwasiat. Namun atas Undang-undang atau Ketentuan KHI wasiat tersebut menjadi ada. Lembaga wasiat ini pada dasarnya penting dan diperlukan guna mengatasi hal-hal atau keadaan-keadaan khusus yang terjadi untuk kasus kewarisan tertentu, yang menyentuh rasa keadilan.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pontianak, bahwa terdapat kasus anak angkat yang menuntut bagian dari harta warisan tersebut, dan Hakim memberikan keputusan bahwa anak tersebut tidak mendapat bagian dari harta warisan karena ia bukan termasuk ahli waris karena orang tua angkat tidak pernah berwasiat untuk memberikan maksimal  $\frac{1}{3}$  harta kepadanya, dan orang tua angkatnya tidak pernah berwasiat sebelum meninggal dunia.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka melalui penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih mendalam tentang implementasi wasiat wajibah di Pengadilan Agama Pontianak berdasarkan Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Ibid 202

## **2. PERMASALAHAN**

Berpedoman pada latar belakang tersebut di atas, yang menjadi rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pro Kontra Wasiat Wajibah di Kalangan Para Ulama sehingga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Wasiat Wajibah dalam Konteks Negara-negara Islam?
3. Bagaimana pertimbangan hukum yang diambil Hakim Pengadilan Agama Pontianak untuk menyelesaikan kasus Wasiat Wajibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?

## **3. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis pro dan kontra wasiat wajibah di kalangan ulama**

Ibn Hazm berpendapat bahwa, wasiat bagi ahli waris yang tidak berhak menerima warisan hukumnya wajib. Bahkan ia mengatakan, fardu hukumnya bagi setiap orang Islam untuk memberikan wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang tidak mewarisinya baik karena perbedaan agama, perbudakan, atau karena ada ahli waris lain yang mendidangnya. Untuk mereka ini, menurut beliau diberi wasiat berupa bagian yang pantas. Jika yang meninggal dunia tidak berwasiat sebelumnya, hendaklah dikeluarkan sebagian dari harta peninggalannya untuk memenuhi kefarduan wasiat yang belum ditunaikannya.<sup>12</sup>

Adanya kewajiban bagi penguasa untuk mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan seseorang, meskipun dia tidak berwasiat sebelumnya. Maksudnya kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan sebagai wasiat, tidak lagi disandarkan kepada ada atau tidaknya seseorang berwasiat semasa hidupnya, tetapi didasarkan kepada hukum yang ditetapkan oleh penguasa. Sehingga sekiranya seorang tidak berwasiat semasa hidupnya, namun secara merta ia dianggap telah berwasiat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, Ibn Hazm mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang ditetapkan oleh penguasa untuk orang-orang tertentu yang diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, sementara pewaris

---

12 Ramlan Yusuf Rangkuti, *Op Cit*, Hal. 375

meninggalkan harta yang baginya berlaku kewajiban wasiat.

Badran Abu al-Ainaini, memberi komentar atas pendapat Ibn Hazm yang mengatkan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat darinya meskipun dia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa penguasa punya kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksana.<sup>13</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat menetapkan wasiat wajibah atas dasar hasil mengkompromikan pendapat-pendapat Ulama salaf dan Ulama khalaf, yakni:<sup>14</sup>

1. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha' dan tabi'in besar ahli fikih dan ahli hadist. Antara lain Said Ibnu-Musaiyab, Hasanul-Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Hazm.
2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab Ibnu Hazm yang dinukil dari fuqaha' tabi'in dan dari pendapat mazhab Imam Ahmad.
3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan kepada sebesar sepertiga peninggalan adalah didasarkan pendapat mazhab Ibnu Hazm dan berdasarkan qaidah syaria'ah: "pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajiblah ditaati".

Jadi dengan demikian, menurut sebagian fuqaha' perintah penguasa itu mewujudkan hukum syara'. Bagian yang wajib dikeluarkan, menurut Ibnu Hazm boleh dibatasi tentang maksimal dan minimalnya oleh si pewasiat sendiri dan ahli waris. Sedang surat Al-Baqarah ayat:180 menjelaskan bahwa wasiat kepada kerabat-kerabat itu ialah wasiat bil-ma'ruf. Istilah ma'ruf dalam ayat tersebut ialah sesuatu usaha yang dapat menenangkan jiwa dengan tidak menyampingkan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 377

<sup>14</sup> *Op Cit*, Hal. 65

kemaslahatan-kemaslahatan.<sup>15</sup> Oleh karena itu adalah suatu keadilan bila pemerintah mewajibkan kepada para ahli waris untuk memberikan pemerintah mewajibkan kepada para ahli waris untuk memberikan bagian dari harta peninggalan yang dipusakai kepada cucu-cucu orang yang meninggal yang orang tua cucu-cucu tersebut telah mati mendahului orang yang mewariskan, sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.

Menurut pendapat ulama muta'akhirin, wasiat wajibah ditunjukan pada kerabat dekat atau yang memiliki hubungan nasab, namun tidak mendapatkan hak waris bukan terhadap anak angkat sebagaimana yang disampaikan dalam teori hukum yang dikemukakan Wahbah Zuhaili, sebagai berikut: "Telah dijelaskan bahwa wasiat kepada kerabat itu adalah disunatkan menurut jumhur ulama'. Di antara mereka itu adalah para imam mazhab empat. Wasiat itu tidak wajib bagi seseorang kecuali sebab hak dari Allah atau bagi para hamba Allah. Sebagai ahli fikih, seperti Ibnu Hazm Adh-Dhahiri dan At-Thobari dan Abu Bakar bin Abdil Aziz dari ulama' mazhab Hambali berpendapat bahwa wasiat itu adalah kewajiban agama dan pembayaran kewajiban bagi kedua orang tua dan para kerabat yang tidak dapat waris karena terhalang dari mewarisi". Adapun Undang-Undang Mesir Suria mengambil pendapat yang kedua: "dan karena wasiat ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan wasiat yang dilakukan secara sukarela karena ketiadaan ijab dari orang yang memberi wasiat dan tidak ada qabul dari orang yang menerima wasiat, maka wasiat wajibah ini menyerupai pembagian warisan, sehingga diperlakukan seperti perlakuan warisan, yaitu bagi laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari bagian perempuan, dan ahli waris yang asal menutupi cabangnya, dan setiap cabang mengambil bagian dari asalnya saja.

Menurut Fatchur Rahman, wasiat wajibah adalah hanya terhadap cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek dan/atau neneknya.<sup>16</sup> Menurut Mohd Zamro Muda, bahwa wasiat wajibah ialah sebahagian

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal. 66

dari pada harta peninggalan yang diperuntukkan oleh undang-undang untuk anak-anak yang kematian ibu atau bapak sebelum datuk atau nenek mereka atau mereka meninggal serentak dan anak-anak tersebut tidak mendapat bagian daripada harta peninggalan datuk atau nenek mereka karena terdindingi (dihijab) oleh bapak atau ibu saudara mereka. Justeru itu, diberikan kepada mereka dengan kadar dan syarat-syarat tertentu sebagai wasiat dan bukannya sebagai pusaka.

Dalam Fikih Islam, wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran, di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris tetapi secara sya'i tidak memperoleh bagian dari jalur faraidh, pada sisi lain, keempat mazhab telah mengharamkan, jika hal itu akan memberikan kemudharatan bagi ahli waris.<sup>17</sup>

Imam al-Syathibiy memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat dan berisikan lima asas hukum syara' yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Pemberian harta waris dengan hibah bukan dengan wasiat wajibah tampaknya akan lebih menjamin tercapainya tujuan-tujuan hukum syara', maka kemaslahatan menjadi tujuan akhir. Teori mashlahah al-Syathibiy tampaknya masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum waris di masa depan, tanpa terjebak pada pemikiran-pemikiran dan teori-teori hukum yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam.<sup>18</sup>

Berdasarkan teori mashlahah, Habiburrahman berpendapat bahwa pembagian harta waris oleh pewaris kepada ahli waris pengganti, anak angkat, dan ahli waris berbeda agama di Pengadilan Agama akan lebih baik ditempuh melalui hibah dan bukan melalui wasiat wajibah. Sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'.<sup>19</sup>

Habiburrahman juga memperoleh temuan bahwa alasan paling mendasar mengapa masyarakat muslim cenderung kurang peka dan merespons secara kritis ketentuan ahli waris pengganti, anak angkat, dan beda agama dengan pertimbangan wasiat wajibah dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991

---

17 Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fiqri, Beirut Libanon, Hal. 1024

18 Al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Hal. 7



tentang Kompilasi Hukum Islam adalah disebabkan pertimbangan kemaslahatan dan adat. Selain karena Inpres tersebut merupakan sumbangan pemikiran ulama di Indonesia, juga karena pertimbangan kemaslahatan umat, yakni untuk tujuan kepastian hukum penyelesaian perkara waris yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum barat.<sup>20</sup>

## **2. Wasiat Wajibah Dalam Konteks Negara-Negara Islam.**

Sebenarnya istilah wasiat wajibah dipergunakan pertama kali di negara Mesir, yaitu melalui perundang-undangan Hukum Waris pada tahun 1946, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan membantu para cucu dari si pewaris yang dikarenakan tidak memperoleh warisan.

Ketentuan seperti halnya di atas tadi, bermanfaat bagi anak-anak dari anak laki-laki yang meninggal atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus kebawah. Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak perempuan saja tidak berlanjut sampai generasi selanjutnya. Dan pemberian wasiat wajibah ini tidak boleh melebihi dari sepertiga tirkah yaitu harta yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Kemudian diikuti lah konsep wasiat wajibah ini oleh negara-negara Islam lainnya, seperti negara Tunisia, negara Yunisia, negara Maroko, Kuwait, dan kemudian barulah diikuti oleh negara kita Indonesia.

Undang-undang wasiat wajibah Mesir nomor 71 Tahun 1946 secara umum mengandung hukum-hukum sebagai berikut:

1. Apabila si pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, atau meninggal secara bersamaan, maka cucu dari anak laki-laki tersebut wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian dari anak laki-laki pewaris yang meninggal tersebut, tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan, dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris dan belum ada bagian untuknya melalui jalan lain (hibah). Bila hibah tersebut lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambahkan kekurangannya;

---

<sup>20</sup> Ibid Hal.237

2. Apabila pewaris mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dengan wasiat yang melebihi bagiannya, maka kelebihan wasiat itu merupakan wasiat ikhtiyarah. Dan bila dia mewasiatkan kepadanya dengan wasiat yang kurang dari bagiannya, maka wajib disempurnakannya. Bila dia mewasiatkan kepada sebagian orang yang wajib diwasiati dan tidak kepada sebagian yang lain, maka orang yang tidak mendapatkan wasiat itu wajib diberikan kadar bagiannya. Orang yang tidak diberi wasiat wajibah dikurangi bagiannya dan dipenuhi bagian yang mendapat wasiat yang kurang dari apa yang diwajibkan, dari sisanya sepertiga. Bila hartanya kurang, maka diambilkan dari bagian orang yang tidak mendapatkan wasiat wajibah dan dari orang yang mendapatkan wasiat ikhtiyarah;
3. Wasiat wajibah itu didahulukan atas wasiat-wasiat yang lain. Bila pewaris tidak mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dan dia mewasiatkan kepada orang lain, maka orang yang wajib diberikan wasiat wajibah tersebut adalah mengambil kadar bagiannya dari sisa dari sepertiga harta warisan bila sisa itu cukup, bila tidak maka dari sepertiga dan dari bagian yang diwasiatkan bukan dengan wasiat wajibah.

Berdasarkan aturan perundang-undangan Mesir tersebut, wasiat wajibah ternyata diperuntukkan pada orang-orang yang memiliki nasab kepada si pewaris, namun mereka dalam penghitungan bagian waris tidak mendapatkannya atau karena terhibah oleh waris yang lebih tinggi derajatnya. Biasanya mereka adalah para cucu laki-laki atau cucu perempuan dari panacar laki-laki maupun dari panacar perempuan.

Ketentuan wasiat wajibah ini seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa sebelumnya telah diperkenalkan oleh undang-undang waris Mesir Tahun 1946 dengan membuat ketentuan mengenai kewajiban adanya wasiat bagi cucu yang yatim dari pewaris. Hal ini lah yang kemudian diikuti oleh negara Syiria dan negara Tunisia.

Dalam undang-undang Tunisia, ketentuan wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi cucu yatim dari generasi pertama, baik laki-laki maupun perempuan (pasal 192), dengan catatan bahwa cucu laki-laki mendapat bagian dua

kali lebih besar dari bagian cucu perempuan.<sup>21</sup>

Prinsip wasiat wajibah yang diadopsi oleh negara Tunisia dari Hukum wasiat Mesir Tahun 1946 juga diberlakukan di negara Maroko dengan beberapa perubahan. Maroko merupakan negara keempat yang mengadopsi prinsip wasiat wajibah ini demi menjamin cucu yatim.

Menurut Undang-Undang Maroko tahun 1958, hak untuk mendapatkan wasiat wajibah tersedia bagi anak (dan seterusnya ke bawah) dari anak laki-laki pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris. Aturan ini tidak ditemukan dalam madzhab manapun dalam fikih tradisional, sebab warisan hanya diperutukkan bagi ahli waris yang masih hidup.<sup>22</sup>

Undang-undang wasiat wajibah di negara Kuwait Nomor 5 Tahun 1977, secara umum menyebutkan sebagai berikut.<sup>23</sup>

1. Bila seseorang yang meninggal (kakek/nenek) tidak berwasiat kepada cucu dari anak-anaknya yang meninggal sebelumnya atau meninggal bersamaan dengan kakek, bagian (warisan) ayah dari harta yang ditinggalkan kakek saat meninggal akan berpindah kepada anaknya (cucu) sebagai harta wasiat yang harus diberikan kepadanya tapi tidak boleh melebihi sepertiga jumlah harta yang boleh diwasiatkan. Cucu tersebut tidak termasuk ahli waris kakek yang meninggal yang tidak memberinya dengan cara lain. Tanpa pertimbangan lain, itulah hak yang harus diberikan kepadanya. Wasiat itu menjadi hak keturunan generasi pertama dari anak perempuan dari orang yang meninggal. Akan tetapi wasiat itu menjadi hak bagi garis keturunan laki-laki ke bawah yang akan menghalangi keturunannya sendiri, tetapi bukan keturunan garis lain (garis perempuan). Bagian anak laki-laki dari orang yang meninggalkan dibagi diantara anak-anak (cucu)-nya ke bawah sesuai prinsip kewarisan yang seakan-akan hubungan itu melalui orang yang dihubungkan kepada orang yang meninggal setelah dia dan kematiannya terjadi pada saat generasi itu masih memiliki hubungan dengannya.

---

21 M. Atho' Muzdhar Dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan Dan Keberangkatan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih*, Ciputat Press, 2006, Hal. 93

22 *Ibid*, Hal. 115

23 *Ibid*, Hal. 172-173

2. Jika orang yang meninggal berwasiat kepada cucu yang melebihi harta yang harus diwasiatkan, pengaruhnya dianggap sebagai wasiat biasa (optional) dan jika dia berwasiat kurang dari batas itu, kewajiban memenuhi wasiat itu sebatas memenuhi haknya. Jika wasiat itu (mestinya) diberikan kepada beberapa orang akan tetapi si mati hanya berwasiat untuk beberapa orang diantaranya, tidak kepada yang lainnya, maka wasiat itu harus juga diberikan kepada mereka (yang tidak diberi wasiat) sesuai haknya. Orang-orang yang tidak diberi wasiat wajibah dan juga orang-orang yang diberi wasiat kurang dari jumlah itu akan mengambil haknya dari sisa sepertiga harta yang boleh diwasiatkan. Jika sisa harta tidak cukup, maka wasiat yang diberikan itu menjadi bersifat optional.

Salah satu hasil dari upaya pembaharuan hukum Islam di dunia Islam adalah produk wasiat wajibah yang sekarang juga masuk dan diberlakukan di negara Indonesia. Meskipun kenyataannya hasil produk wasiat wajibah ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyaknya kekaburan tentang pembagiannya, dan boleh jadi, consensus ulama Indonesia yang menghasilkan wasiat wajibah adalah hanya mengambil kreasi dari peraturan perundang-undangan Mesir Nomor 71 tahun 1946.

Di Indonesia pada mulanya membatasi persoalan wasiat wajibah ini terhadap anak angkat dan orang tua angkat yang jelas bukan memiliki kekerabatan apapun sekalipun jauh. Mereka akan mendapat wasiat wajibah sebagaimana para cucu yang memungkinkan memperoleh wasiat wajibah. Problem lain adalah menyangkut akibat hukum terhadap anak angkat atau orang tua angkat berupa masalah kewarisan. Apakah mereka berhak mendapat warisan dari orang tua angkat mereka atau tidak, begitu pula sebaliknya terhadap orang tua angkat mereka.

Menurut hukum Islam yang umum, anak angkat atau pun orang tua angkat tidak sama dengan kedudukannya sebagai anak kandung ataupun orang tua kandung yang berhak secara ijbari memperolehnya. Namun dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, anak angkat atau pun orang tua angkat menjadi populer dengan adanya ketentuan hukum bahwa mereka berhak atas wasiat wajibah.

Konsep yang mendasar dari Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut, bahwa wasiat mengutamakan orang lain yang bukan ahli waris. Sedang orang tersebut biasanya adalah anak angkat. Tampaknya Kompilasi Hukum Islam telah menjembatani kenyataan untuk menempatkan anak angkat dan/atau orang tua angkat hanya dalam perwasiatan harta bukan melewati hak kewarisan seperti sebagian pendapat yang mengambil dasar pada hukum adat. Kemudian Kompilasi Hukum Islam memasukkan kerabat seperti para cucu dalam bagian warisan melewati jalur ahli waris pengganti. Cara ini berbeda dengan kebanyakan di negara-negara mayoritas muslim, di mana wasiat wajibah diperuntukkan bukan terhadap anak angkat dan/atau orang tua angkat tetapi kepada kerabat sedarah yang tidak memperoleh hak warisnya karena terhalang oleh penghalang pewaris.

Berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, ternyata Pengadilan Agama Pontianak pernah memberikah hak hibah harta waris dari orang tua angkat terhadap anak angkat, yang mana dalam putusan ini diberikan kepada anak angkat berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Pontianak Nomor 265 Tahun 2013 Dimana pada putusan tersebut memberikan hak berupa hibah kepada anak angkat.

## **1. Analisis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 213/Pdt.G/2017/PA.Ptk TAHUN 2017**

### **A. Deskripsi Kasus**

Pada tanggal 24 Februari 2017 PUNAYO bin alm. NADIN, umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jl. Parit Wan Salim RT.003 RW. 26 Kel. Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dalam hal ini sebagai “**Penggugat I**”, SUMRIYEH binti alm. NADIN, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Parit Wan Salim Gg. Persungan RT.003 RW. 26 Kel. Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dalam hal ini sebagai “**Penggugat II**”, HOLIL bin alm. NADIN, umur 62

Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jl. Parit Wan Salim Gg. Persada RT.003 RW. 26 Kel. Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dalam hal ini sebagai “**Penggugat III**”, SUMRATI binti alm. NADIN, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Gang Selat Madura Dalam RT.003 RW. 26 Kel. Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dalam hal ini sebagai “**Penggugat IV**”, MUHAMMAD WAHID bin alm. NADIN, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jl. Parit Wan Salim Gang Perjuangan Dalam RT.003 RW. 26 Kel. Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dalam hal ini sebagai “**Penggugat V**”, SULIYAH binti alm. NADIN, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gang Dharma Putra 14 RT.14 RW. 028 Kel. Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dalam hal ini sebagai “**Penggugat VI**”, MUHLISA binti alm. NADIN, umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Tritura Tanjung Hilir RT.30 RW. 01 Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dalam hal ini sebagai “**Penggugat VII**”, dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak di bawah register perkara Nomor: 213/Pdt.G/2017/PA.Ptk. bermaksud melawan MUNIRAH, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gg. Parwasal RT.04 RW. IV, Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontinak Utara, Kota Pontianak sebagai “**Tergugat**” dan Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2017 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak Nomor 213/Pdt.G/2017/PA.Ptk Tanggal 01 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa alm. SALIYEH binti NADIN memiliki sebidang tanah yang berdiri bangunan terletak di Jl. Parwasal No. 22 Kelurahan Siantan

Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.2080/Siantan Tengah, Surat Ukur No. 3316/1984 Tanggal 8 September 1984, seluas 265 M<sup>2</sup> selanjutnya disebut Objek Sengketa (Btable Ground);

2. Bahwa alm. SALIYEH binti NADIN semasa hidupnya menikah dengan MUNIGAR bin ISMAIL dan tidak dikaruniai anak, sehingga mengasuh Tergugat;
3. Bahwa alm. SALIYEH binti NADIN telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2011 begitupun dengan suaminya yakni MUNIGAR bin ISMAIL yang meninggal terlebih dahulu pada tanggal 12 Februari 2007;
4. Bahwa alm. SALIYEH binti NADIN memiliki 8 saudara yakni 7 saudara seayah (alm. NADIN bin DEIBES meninggal pada Tanggal 10 April 2007) dan seibu (alm. MARSINTI binti EMBU, meninggal pada tanggal 8 April 2011) yakni :
  - SAWARI bin alm. NADIN (Penggugat I)
  - PUNAYO bin alm. NADIN (Penggugat II)
  - SUMRIYEH binti alm. NADIN
  - SARIDEH binti alm. NADIN (Penggugat III)
  - SUMRIATI binti alm. NADIN (Penggugat IV)
  - MUHAMMAD WAHID bin alm. NADIN (Penggugat V)
  - SULIYAH binti alm. NADIN (Penggugat VI)

Dan 1 Saudara yang seayah dengan Ibu yang bernama ASIA, meninggal pada tanggal 4 Oktober 2007, yaitu MUHLISA bin alm. NADIN (Penggugat VII)

5. Bahwa oleh karena Akta Hibah No. 660/062/PU/1997, tanggal 21 Agustus 1997 dibuatkan di hadapan SUWANTO, S.H., Notaris dan PPAT di Pontianak telah melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berarti cacat hukum, sehingga mengakibatkan Akta Hibah tersebut batal demi hukum;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat cukup kenal baik, Para

penggugat secara kekeluargaan telah meminta tergugat untuk menyelesaikan secara baik-baik masalah Objek Sengketa, namun Tergugat tidak menghiraukan ajakan tersebut, Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi Para Penggugat selain mengajukan gugatan ini;

7. Bahwa untu menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat bila t gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Penggugat memohon agar Tergugat, atau siapa pun yang mendapatkan hak daripadanya secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, setiap hari Tergugat lalai/keterlambatan memenuhi isi putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak berkenan memanggil, memeriksa dan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sebidang tanah yang berdiri bangunan terletak di Jl. Parwasal No. 22, Siantan Tengah, Kota Pontianak berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.2080/Siantan Tengah, Surat Ukur No. 3316/1984 Tanggal 8 September 1984, seluas 265 M<sup>2</sup> merupakan harta peninggalan dari alm. SALIYEH binti NADIN dan merupakan harta waris yang belum dibagi;
3. Menyatakan Akta Hibah No. 660/062/PU/1997, tanggal 21 Agustus 1997 dibuatkan di hadapan SUWANTO, S.H., Notaris dan PPAT di Pontianak, cacat hukum dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah yang berdiri bangunan terletak di Jl. Parwasal No. 22, Siantan Tengah, Kota Pontianak berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.2080/Siantan Tengah, Surat Ukur No. 3316/1984 Tanggal 8 September 1984, seluas 265 M<sup>2</sup> tersebut adalah tanpa hak;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya, Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### ***B. Amar Putusan***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memaksimalkan perdamaian tersebut Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Drs. H. Syaukani, M. HI sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil. Berdasarkan laporan Mediator tertanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas maka sebenarnya perkara ini bukan sengketa waris akan tetapi Pembatalan Hibah, karena Objek Sengketa dapat menjadi warisan jika Hibah (Objek Sengketa) yang dihibahkan kepada MUNIRA dibatalkan, jadi perkara ini seharusnya perkara pembatalan hibah (Petitum Angka 4);

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Khusus Para Penggugat memberikan Kuasa kepada Dwi Joko Prihantono, SH, MH dan Rekan, untuk dan nama Pemberi Kuasa, mewakili, memberikan bantuan hukum kepada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan “Sengketa Waris” terhadap MUNIRA, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gang Parwasal RT.04 RW. IV, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Syarat sebagaimana disebut di atas adalah bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan surat kuasa tidak sah, dengan kata lain Surat Kuasa Khusus cacat Formil;

Selanjutnya apabila ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut terdapat kekurangan syarat syaratnya di atas, maka Pengadilan Negeri/Agama atau Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Agama tidak dibenarkan lagi untuk memberikan kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA RI Nomor 1 Tahun 1971;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus dalam perkara a quo hanya menyebutkan sengketa waris dan tidak menyebutkan pembatalan hibah sedangkan Objek Sengketa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah pembatalan hibah (Petitum Angka 4) dengan kata lain jika hibah dibatalkan, baru Objek sengketa tersebut menjadi harta warisan, Maka surat kuasa khusus yang demikian, Majelis berpendapat Surat Kuasa Khusus mengandung cacat formil karena tidak menyebutkan jenis perkara “Pembatalan Hibah” dan Oleh karena itu maka Kuasa Hukum dalam perkara a quo tidak mempunyai Legal Standing in Yudicio mewakili Para Penggugat untuk mengajukan Pembatalan Hibah;

Menimbang, bahwa Oleh karena Surat Kuasa Khusus mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim berpendapat tak perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklard)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, dan Majelis Hakim pun mengadili :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.141.000,- (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

## **1. PENUTUP**

Dari analisis dan uraian pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam memandang wasiat wajibah merupakan suatu hukum yang sudah memperhatikan aspek mashlahah sebagai pertimbangan utama, dan Mayoritas ulama memiliki pandangan yang sama tentang wasiat wajibah.
2. Banyak dari kalangan umat Islam sendiri yang belum memahami tentang wasiat wajibah ini.
3. Pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama Pontanak dalam mengambil keputusan berdasarkan jenis kasus karena Hakim pasti memperhatikan aspek maslahat bagi semua pihak selama tidak bertentangan dengan Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhari, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Pontianak, FH Untan Press, Hal.201

Ahmad Azhari, 2016, Telaah Terhadap Hukum Kewarisan KHI, Pontianak, Percetakan Artha Grafistama

A. Rohmat Rosyadi dan H. M. Rais Ahmad, 2006, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal 99-100

Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Dar al-Fiqri, Beirut Libanon

Al-Syathibi, al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut

Fathur Rahman, Ilmu Waris, Bandung, Al-Ma'arif, Tth, 2003

Mardani, 2015, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

M. Atho' Muzdhar Dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan Dan Keberlanjutan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih, Ciputat Press, 2006

M. Yahya Harahap, 2001, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No 7 Tahun 1989, Sinar Grafika, Jakarta

Ramlan Yusuf Rangkuti, Fikih Kontemporer Di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010

Sukris Sarmadi, 2013, Hukum Waris Islam di Indonesia, Yogyakarta, Aswaja Pressindo